



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

*Jalan Surawinata No. 30A Purwakarta
e-mail : bapenda@purwakartakab.go.id*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (good governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Harapan kami semoga LAKIP ini dapat bermanfaat baik bagi Bapenda untuk mencapai perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Februari 2023



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	3
1.4. Aspek Strategis Daerah	5
1.5. Struktur Organisasi	7
Bab II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Realisasi Anggaran	18
Bab IV P E N U T U P	24



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang disingkat Bapenda pada saat ini merupakan hasil penataan kembali Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dan merupakan hasil pemisahan dari unit kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang dipisahkan menjadi 2 unit kerja Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. DPKAD dipisah menjadi 2 Badan tipe B yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun Bapenda merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau dalam hal ini disebut sebagai “Wajib Pajak” sangat mutlak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (good governance) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, dimana BAPENDA masuk ke dalam misi Kabupaten Purwakarta yang ke 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesional. Adapun Bapenda saat ini



mengadopsi dua indikator kinerja sasaran yaitu “Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat”, sesuai dengan keterbatasan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, Bapenda Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 2 (dua) Program yang terdiri dari 1 Program Rutin dan 1 Program Teknis dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 39 sub kegiatan.

Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

- a. Mewujudkan Laporan Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan Mekanisme dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

2) Sasaran

- a. Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang Profesional dan Akuntabel.
- b. Terciptanya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja Sasaran:

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat



Kendala-kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan tax dicipline sebagian Wajib Pajak/Wajib Retribusi relatif masih kurang;
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah masih kurang;
3. Jumlah pegawai/petugas pemungut pajak belum memadai (masih kurang);
4. Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riilnya; dan
5. Belum tersusunnya regulasi pendapatan secara lengkap.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang kemudian disebut LAKIP.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan



tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupatén Purwakarta disusun untuk memenuhi pencapaian kinerja Bapenda pada Tahun Anggaran 2022 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupatén Purwakarta Tahun 2022 didasarkan atas:

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 9) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- 10) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
- 11) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi



vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tentu memiliki wewenang dalam mengurus urusan pemerintahannya masing-masing. Kewenangan yang dibuat harus sesuai aturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kota/kabupaten. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

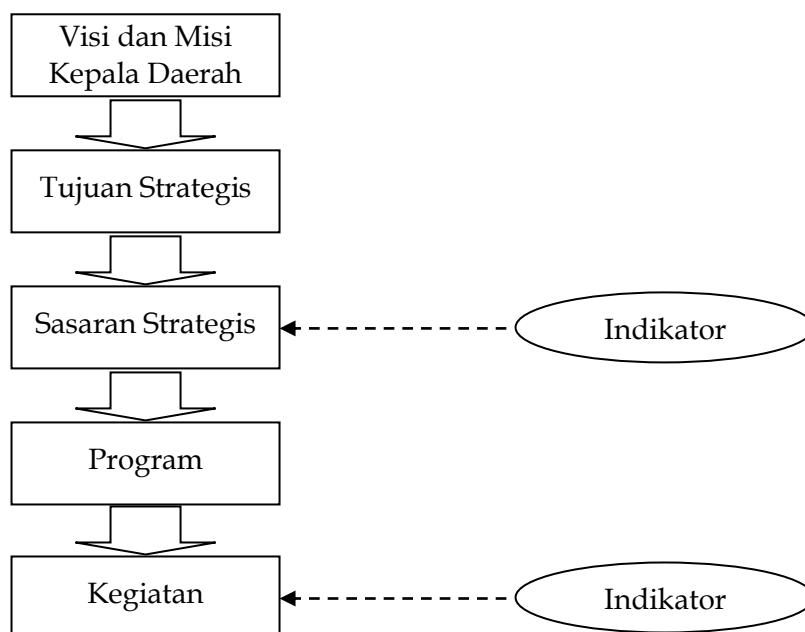
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan badan penyelenggara urusan pemerintahan dan



elayanan umum dibidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dikelola dan diatur kebijakannya oleh BAPENDA diantaranya pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS) dan pembinaan retribusi daerah, yaitu meliputi kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengelolaan data, serta penagihan, pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4 Aspek Strategis Daerah

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini disajikan mengikuti alur pikir sebagaimana Gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan LAKIP

Aspek strategis dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu keberhasilan bagi pendapatan daerah. Adapun faktor penentu keberhasilan adalah faktor-faktor yang ada dalam organisasi maupun yang berada di luar organisasi yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Perangkat perundang-undangan yang mendukung;
- 2) Kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur;
- 3) Kelembagaan dan manajemen pemerintahan.

1.5 Struktur Organisasi

1.5.1 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahkan:
 - Subbidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB
 - Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahkan:
 - Subbidang Penetapan dan Verifikasi
 - Subbidang Analisa dan Pengembangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, membawahkan:
 - Subbidang Penagihan
 - Subbidang Evaluasi Pelaporan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Data Pegawai Bapenda

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pangkat/Golongan	
	a. Golongan IV	1
	b. Golongan III	30
	c. Golongan II	25
	d. Golongan I	0
Jumlah		57
2	Pendidikan	
	a. S-2	1
	b. S-1	25
	c. D-3	7
	d. D-1	1
	e. SMA	23
Jumlah		57

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 57 (lima puluh enam) orang, terdiri dari jabatan struktural sebanyak 12 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 8 orang, dan jabatan fungsional umum sebanyak 37 orang.

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi oleh pegawai lulusan S1 dan SMA.

1.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten



Purwakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Tugas Pokoknya antara lain:

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.
3. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Pelayanan.
4. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
5. Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan.

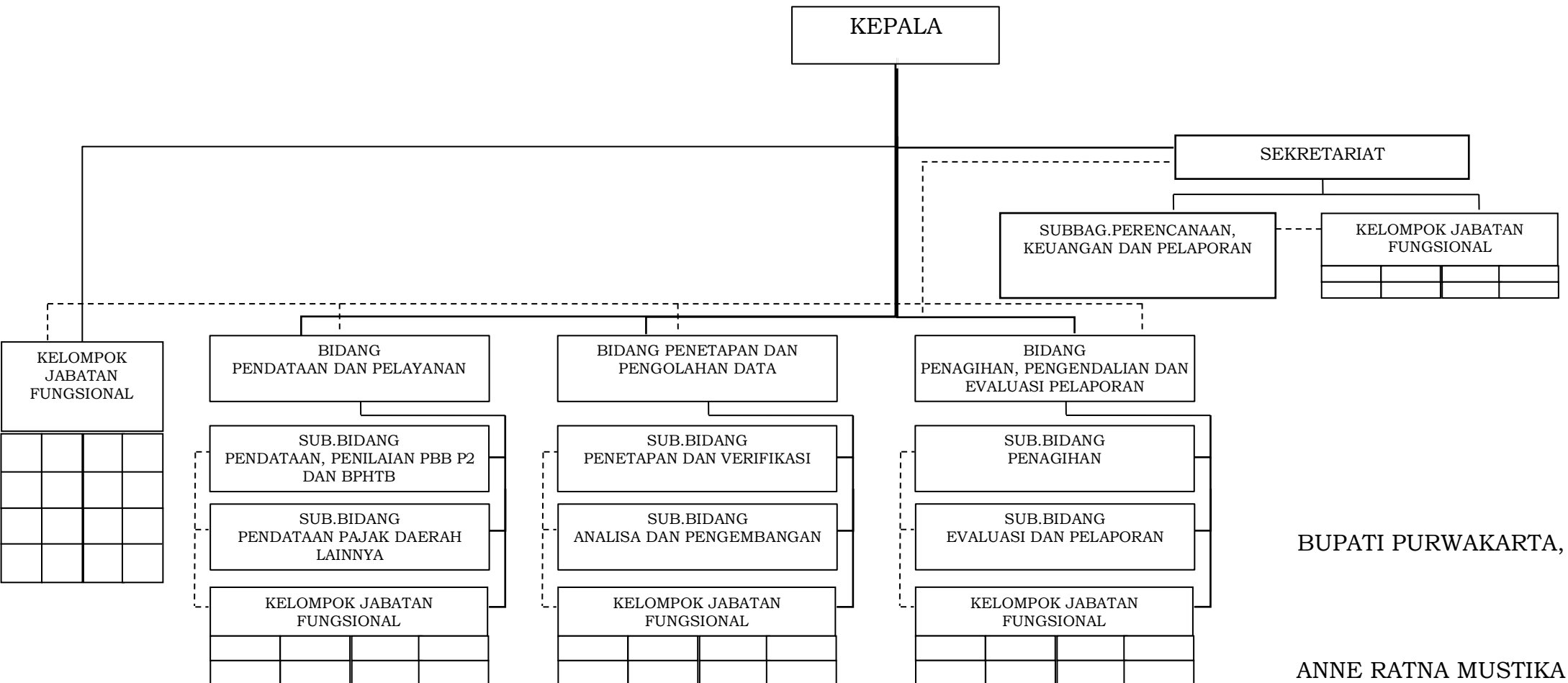
Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:



1. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2018-2023 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Kabupaten Purwakarta serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sasaran Strategis tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 19,75% dan didukung oleh 1 Program.
 - b. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu indek kepuasan masyarakat dengan target sebesar 79 dan didukung oleh 1 Program.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah



- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

❖ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam:

- Kelompok indikator *input* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2018-2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang
Profesional dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tercapai/ Tidak Tercapai
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	19.50	21.41	19.75	20,45	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	78.92	79	79.43	Tercapai

Sasaran ini memiliki 2 (dua) buah indikator yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang realisasinya sebesar **20,45%** dari target yang ditetapkan sebesar **19,75%**. Pendapatan Asli Daerah mencapai Realisasi sebesar **Rp 491.618.287.828,-** dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp 2.404.080.166.746,-**

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

- Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar **Rp.441.350.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp.334.438.766.010,-** atau **75,78%** yang didalamnya terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pajak Air Tanah dengan capaian **128,77%** dan capaian realisasi terendah pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan capaian hanya sebesar **24,44%**.
- Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar **Rp.40.983.359.774,-** dan realisasi sebesar **Rp.14.317.840.779,-** atau **34,94%** yang didalamnya terdapat Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Retribusi Jasa Umum dengan capaian sebesar **91,13%** dan capaian realisasi terendah Retribusi Perizinan Tertentu dengan capaian hanya sebesar **16.51%**.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target **Rp.7.717.532.000** - dan realisasi sebesar **Rp. 6.959.205.038,-** atau **90.17%** yang didalamnya terdapat Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas



Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan capaian sebesar **98.50%**.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar **Rp. 205.560.688.426,-** dan realisasi sebesar **Rp.135.902.476.001,-** atau **66.11%** yang didalamnya terdapat Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan capaian sebesar **89,96%** dan capaian realisasi terendah pada Pendapatan Bunga dengan capaian hanya sebesar **0.00%**.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 buah sasaran dan 2 buah indikator. Adapun Sasaran tersebut didukung pula oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel berikut ini akan menguraikan, anggaran, realisasi dan capaian kinerja per program:



Tabel 3.2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19.75	20.45	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,501,318,450	5,382,348,627	71,75	-	Cukup Baik
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79.43	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,501,318,450	5,382,348,627	71,75	-	Cukup Baik
					- Perencanaan pengelolaan pajak daerah	105,547,800	80,000,000	75,80	- 1 Dokumen	Cukup Baik
					- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	453,131,900	333,192,900	73,53	- 1 Dokumen	Cukup Baik
					- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	274,998,250	246,920,220	89,79	- 1 Laporan	Baik
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100.028.400	90.166.500	90,14	- 5 Jenis	Sangat Baik



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	712.013.600	637.543.719	89,54	- 12 Laporan	Baik
					- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.090.147.100	1.327.421.700	63,51	- 12 Laporan	Kurang Baik
					- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	324.999.900	271.763.000	83,62	- 406 Obyek Pajak	Baik
					- Penetapan Wajib Pajak Daerah	138.538.750	129.489.250	93,47	- 452179 Dokumen	Sangat Baik
					- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	621.634.850	551.371.750	88,70	- 11156 Layanan	Baik
					- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	54.822.400	12.446.000	22,70	- 452179 Dokumen	Kurang Baik
					- Penagihan Pajak Daerah	1.675.499.600	1.116.505.338	66,64	- 455425 Dokumen	Kurang Baik
					- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	374.994,250	221.312.000	59,02	- 139 Dokumen	Kurang Baik



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	449.968.050	249.790.900	55,51	- 35 Dokumen	Cukup Baik
					- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	124.993.600	116.571.850	93,26	- 4 Laporan	Sangat Baik



Maka berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian realisasi anggaran program dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 14 sub kegiatan dan Anggaran sebesar **Rp. 7.501.318.450,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.382.348.627,-** atau **71,75%**.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi anggaran adalah **cukup baik**.



BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2022 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dari hasil analisis kinerja, maka diperoleh capaian akhir kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **71,75%** yang berarti cukup baik adapun capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **20,45%**.
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **79.43**.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Optimalisasi Sumber daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara

mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara:
1. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
 2. Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui Penggalan potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 3. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.

Demikianlah, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjadi cerminan bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya menuju tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang lebih baik.

Purwakarta, Februari 2023



KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM

NIP. 19791218 200501 1 008

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
 Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
 Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan professional

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	19.75	20.45	$\frac{\text{Realisasi PAD} \times 100}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$ $\frac{\text{Rp. 491.618.287.828} \times 100}{\text{Rp. 2.404.080.166.746}}$



Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Purwakarta
H. ARI SPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
 NIP. 19791218 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AI SAIDAH, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

Pihak Pertama

AI SAIDAH, SE, MM
NIP. 19740524 199901 2 001

Lampiran Formulir TAPKIN SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16,655,300	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 15,122,700	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 70,373,600	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20,967,383,514	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 60,449,600	APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 89,270,000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 100,800,000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25,060,700	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 259,428,350	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14,992,850	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 290,333,800	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 427,956,000	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6,000,000	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	50,000,000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	69,686,000	APBD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	72,798,000	APBD
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	100,000,000	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Mebel	Rp	190,260,300	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,000,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	611,580,000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,159,227,360	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan				
1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	27,500,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	122,100,000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	150,800,000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	349,108,000	APBD
TOTAL		Rp	25,251,886,074	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

Pihak Pertama

AI SAIDAH, SE, MM
NIP. 19740524 199901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AJI SAEPULLOH, S.Sos.**
Jabatan : JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AI SAIDAH, SE, MM**
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

AI SAIDAH, SE, MM
NIP. 19740524 199901 2 001

Pihak Pertama

AJI SAEPULLOH, S.Sos.
NIP. 19651122 199401 1 001

Lampiran Formulir TAPKIN SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16,655,300	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 15,122,700	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 70,373,600	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20,967,383,514	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 60,449,600	APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 89,270,000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 100,800,000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25,060,700	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 259,428,350	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14,992,850	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 290,333,800	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 427,956,000	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6,000,000	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	50,000,000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	69,686,000	APBD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	72,798,000	APBD
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	100,000,000	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Mebel	Rp	190,260,300	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,000,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	11,580,000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,159,227,360	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan				
1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	27,500,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	122,100,000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	150,800,000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	349,108,000	APBD
TOTAL		Rp	25,251,886,074	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



AI SAIDAH, SE, MM
NIP. 19740524 199901 2 001

Pihak Pertama



AJI SAEPULLOH, S.Sos.
NIP. 19651122 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

Pihak Pertama

ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP
NIP. 19730517 200801 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19,75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 105.547.800	APBD
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 453.131.900	APBD
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 2.090.147.100	APBD
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 138.538.750	APBD
5	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 54.822.400	APBD
TOTAL		Rp 2.842.187.950	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

Pihak Pertama

ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRIYANTI LESTARI, SE, MMRS**

Jabatan : Kasubid Analisa dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP**

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama

FITRIYANTI LESTARI, SE, MMRS
NIP. 19820629 200801 2 004

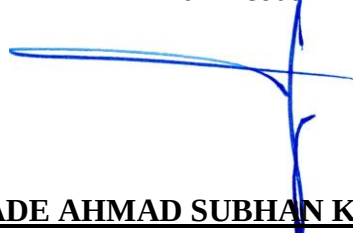
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 105,547,800	APBD
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 453,131,900	APBD
TOTAL		Rp 558,679,700	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama



FITRIYANTI LESTARI, SE, MMRS
NIP. 19820629 200801 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DADAN ISKANDAR, SE**
Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama

DADAN ISKANDAR, SE
NIP. 19820812 200902 1 003

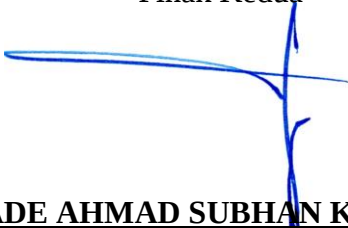
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 693,844,700	APBD
	TOTAL	Rp 693,844,700	APBD

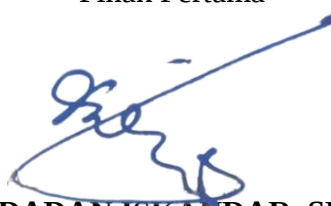
Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama



DADAN ISKANDAR, SE
NIP. 19820812 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDI PURWANA, S.Si**
Jabatan : Kasubid Penetapan dan Verifikasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama

EDI PURWANA, S.Si
NIP. 19800523 201001 1 004

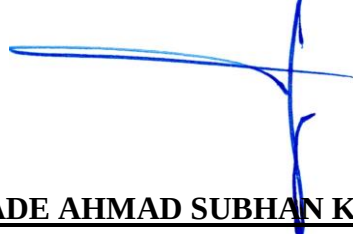
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 1,396,302,400	APBD
2	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 138,538,750	APBD
3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 54,822,400	APBD
TOTAL		Rp 1,589,663,550	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



ADE AHMAD SUBHAN KN, S.IP.
NIP. 19730517 200801 1 004

Pihak Pertama



EDI PURWANA, S.Si
NIP. 19800523 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

Pihak Pertama

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 100,028,400	APBD
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 712,013,600	APBD
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 324,999,900	APBD
4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 621,634,850	APBD
TOTAL		Rp 1,758,676,750	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIP SURACHMAN, ST**
Jabatan : Kasubid Pendataan Pajak Daerah Lainnya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama

ARIP SURACHMAN, ST
NIP. 19810217 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 712,013,600	APBD
	TOTAL	Rp 712,013,600	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama



ARIP SURACHMAN, ST
NIP. 19810217 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDWIN PERMANAKUSUMAH, SE**

Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama

EDWIN PERMANAKUSUMAH, SE
NIP. 19720208 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 100,028,400	APBD
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 621,634,850	APBD
	TOTAL	Rp 721,663,250	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama

EDWIN PERMANAKUSUMAH, SE
NIP. 19720208 200701 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARPIYAN LH, SH**

Jabatan : Kasubid Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama

ARPIYAN LH, SH
NIP. 19810427 200801 1 001

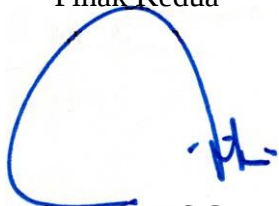
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan		
1	Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 324,999,900	APBD
	TOTAL	Rp 324,999,900	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



DAYLI SETIAJI, S.STP, M.Si
NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama



ARPIYAN LH, SH
NIP. 19810427 200801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH FITRIAH, SE**
Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ALFATAH, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003

ENDAH FITRIAH, SE
NIP. 19760111 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 274,998,250	APBD
2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 374,994,250	APBD
TOTAL		Rp 649,992,500	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003



ENDAH FITRIAH, SE
NIP. 19760111 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULANA RAMADHAN, SE**

Jabatan : Kasubid Penagihan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ALFATAH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003

MAULANA RAMADHAN, SE
NIP. 19870503 201012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Penagihan Pajak Daerah	Rp 1,675,499,600	APBD
	TOTAL	Rp 1,675,499,600	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003



MAULANA RAMADHAN, SE
NIP. 19870503 201012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGI SALEH, SE**
Jabatan : Kasubid Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ALFATAH, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003

YOGI SALEH, SE
NIP. 19800413 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 449,968,050	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 124,993,600	APBD
TOTAL		Rp 574,961,650	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003



YOGI SALEH, SE
NIP. 19800413 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ALFATAH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

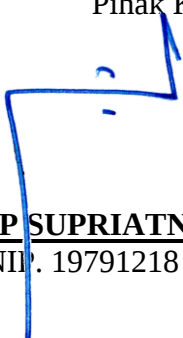
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008


H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	19.75%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 274,998,250	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah	Rp 1,675,499,600	APBD
3	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 374,994,250	APBD
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 449,968,050	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 124,993,600	APBD
TOTAL		Rp 2,900,453,750	APBD

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM
NIP. 19791218 200501 1 008

H. ALFATAH, SE, MM
NIP. 19700527 200901 1 003